

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI KEGIATAN BANGGA KENCANA DI KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS
dan
PENGUATAN KEMITRAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHAP II
KABUPATEN LAMONGAN, 9 AGUSTUS 2022**

**Disusun Oleh
Muhammad Rif'an Agus, SE
Penata KKB Ahli Muda**

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera dan berkualitas merupakan fondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS 2015 menunjukkan keluarga Indonesia berada dalam kondisi yang rentan. Angka kematian ibu masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian bayi Indonesia sebanyak 22 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Potret ini akan berpengaruh dalam pengelolaan keluarga serta pola pengasuhan yang berdampak kepada kualitas manusia.

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus negara saat ini adalah tingginya prevalensi stunting anak balita. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015, prevalensi stunting di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%, namun kembali meningkat menjadi 30.8% pada tahun 2017. Survei yang dilakukan oleh Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, menemukan bahwa prevalensi stunting lebih rendah 3 persen dari hasil Riskesdas 2018 (30.8 persen), yaitu menjadi 27.7 persen pada tahun 2019. Namun demikian dengan adanya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 dan 2021 diperkirakan indikator-indikator kualitas sumber daya manusia tersebut akan memburuk.

Kebijakan dan program yang dilakukan berbagai institusi/lembaga yang menyoar pada keluarga umumnya sudah terarah dan berkelanjutan. Namun demikian, proses pelayanan yang dilakukan berbagai institusi/lembaga tersebut belum terpadu. Situasi dan kondisi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurang maksimalnya tingkat keberhasilan kebijakan dan program yang dilakukan lembaga/institusi yang menyoar pada keluarga sebagai target kebijakan atau programnya. Untuk itu diperlukan kebijakan nasional yang memastikan seluruh kebijakan program yang menjadikan institusi keluarga sebagai sasaran di Kementerian/Lembaga terintegrasi dan terkonvergensi pelaksanaannya secara nasional dalam satu pintu, seluruh program dan kegiatan terintegrasi dalam sistem penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga (national center of excellence), dan setiap desa berfungsi sebagai pusat pelayanan penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga (pusat data, informasi, koordinasi dan rujukan,dll).

Menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan re-konseptualisasi Kampung KB dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, dimana perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas bahwa Kampung KB merupakan kampung pembangunan kualitas manusia Indonesia. Kampung KB yang semula didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat berubah menjadi satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat, yang akan dipayungi dengan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Program Kampung Keluarga Berkualitas untuk mengoptimalkan upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional. Untuk itu diperlukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas serta pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konvergensi lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas
2. Penguatan tata kelola Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya percepatan penurunan stunting

3. Ruang Lingkup

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah para pengelola Kampung KB (Pokja Kampung KB), PKB Pendamping Kampung KB serta OPD KB Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang narasumber pada kegiatan ini adalah Tim Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, OPD-KB Kabupaten/Kota dan Dinas Lintas sektor terkait (Dinkes/Dokter Spesialis Anak dan Bappeda) dengan Materi yang di sampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) oleh Tim Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
2. Bagaimana Cara Mengenali/Deteksi Dini Pada Anak Yang Beresiko Stunting di Kampung KB oleh Dinas Kesehatan/Dokter Spesialis Anak
3. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB oleh Bappeda Kabupaten/Kota

4. Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2022, di aula pertemuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan Jl. Pahlawan No. 27 Lamongan, Desa Karangmulyo, Sukomulyo, Kec. Lamongan Kabupaten Lamongan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan ini adalah berupa sosialisasi program Kebijakan Pengelolaan Kampung KB seiring telah diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 sekaligus Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB. Selain itu juga di sampaikan Paparan dari para narasumber perwakilan dari Dinas Kesehatan/Dokter Spesialis Anak Kabupaten Lamongan dan Bappeda Kabupaten Lamongan. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas PPKB Kab. Lamongan dan dilanjutkan panel Materi dari para narasumber. Kegiatan ini diikuti oleh lintas sector (OPD KB), Perwakilan Kepala Desa, Ketua Pokja Kampung KB serta PKB Pendamping Kampung KB. Adapun resume dari para pemateri adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan BKKBN Prov. Jatim

- Kampung KB merupakan wilayah setingkat desa/kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
- Strategi penyelenggaraan Kampung KB antara lain dengan peningkatan komitmen dan peran serta para pemangku kebijakan, Penguatan basis data keluarga, Pengintegrasian program pembangunan SDM berbasis Keluarga, dan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Arahan Bapak Presiden mewujudkan Kampung KB di seluruh penjuru tanah air dengan dikuatkan melalui penerbitan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 yang mengamanahkan kepada 13 kementerian dan Lembaga dengan dikoorditaori Menko PMK
- Program-program berbasis desa di berbagai K/L harus disinergikan agar memberikan dampak yang optimal bagi terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas
- Di Jawa Timur terdapat 1423 Kampung KB atau baru 16,76 % dari 8.496 Desa/Kelurahan
- BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai Amanah perpres 72 tahun 2021
- Program Dashat merupakan salah satu strategi upaya percepatan penurunan stunting di Kampung KB melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemberian makanan bergizi bagi keluarga beresiko stunting

2. RSUD dr. Soegiri Lamongan/Dokter Spesialis Anak Kabupaten Lamongan

- Malnutrisi kronis dan anemia masih menjadi masalah utama di seluruh dunia
- Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui masalah ini, masyarakat lebih memperhatikan gizi buruk sebagai cara untuk menentukan keadaan gizi negaranya
- Usia 0-2 tahun (1000 HPK) penambahan Panjang badan harus sesuai garis pertumbuhan berapapun tinggi badan orang tuanya
- Menentukan stunting harus diukur dan di plotting
- Untuk mendapatkan data yang akurat dimulai dengan cara penimbangan dan pengukuran Panjang badan dan tinggi badan yang benar
- Alat penimbangan dan pengukuran harus lengkap dan sesuai standart
- Kurva perkembangan anak bisa dijadikan acuan pengukuran dan penentuan apakah anak beresiko stunting atau tidak

3. Bappeda Kabupaten Lamongan

- Akses pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu harus tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemic
- Prevalensi harus turun sebesar 2,7% setiap tahun dari tahun 2018
- Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting
- Pilar ke-3 terkait peningkatan konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif di lintas kementrian/Lembaga
- Kreteria penetapan desa lokasi prioritas sekurang-kurangnya meliputi prevalensi stunting, jumlah kasus stunting melebihi rata-rata dan memiliki lebih dari 50% indikator utama cakupan intervensi gizi tergolong kurang
- Tahun 2023 lokus desa prioritas penurunan stunting terdapat 17 desa yang tersebar di 10 kecamatan dengan prevalensi diatas 13% di Kabupaten Lamongan
- Permasalahan stunting disebabkan oleh factor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisector
- Peran Bappeda terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi
- Tantangan dalam perencanaan antara lain data tidak tersedia/meragukan, pelaksanaan aksi masih belum dapat mengikuti siklus perencanaan dan perlu pengawalan agar usulan kegiatan terkait stunting dapat masuk kedalam penganggaran APBD Kab, APBDes, DAK, dll.

C. HASIL YANG DICAPAI.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Program Bangga Kencana di Kampung KB serta Penguatan Kemitraan di Kampung Keluarga Berkualitas adalah tersosialisasinya program Kampung KB, Inpres no. 3 Tahun 2022 dan Dashat sebagai upaya percepatan penurunan stunting, Cara deteksi dini anak yang terindikasi stunting di kampung KB dengan dan dukungan anggaran dalam mendukung program Kampung KB dan Dashat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran pada kegiatan ini :

1. Komitmen bersama antar lintas sector sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kampung KB
2. Kampung KB sebagai salah satu wadah dalam upaya percepatan stunting melalui program Dashat
3. Sinergitas program lintas sector sangat dimungkinkan dapat terlaksana
4. Anggaran dana desa bisa dimanfaatkan dalam percepatan penurunan stunting
5. Diharapkan semua pihak berkomitmen dalam menjalankan program PPS secara konvergensi

E. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas serta Penguatan Kegiatan Kemitraan di Kampung KB Kabupaten Lamongan, Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kab. Lamongan
Pada Tanggal 9 Agustus 2022
Subkoordinator ADK

Muhammad Rif'an Agus, SE

DOKUMENTASI



